KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Muhaimin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulang Kemiskinan akibat Covid 19
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Muhaimin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulangi Kemiskinan akibat Covid-19

SETAHUN lebih pandemi covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memorakporandakan perekonomian dunia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap memberi makna pandemi ini.

"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari akibat pandemi covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI, Selasa (16/2).

Dengan mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan dampak pandemi covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang.

Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus pada kemiskinan ekstrem akibat pandemi.

"Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang

DOK DPR

sehingga jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki mencoba untuk bangkit.

"Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32%, pada kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9% hingga 1,1%," tuturnya.

Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di mana tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan?

Sebagai salah satu pilar demokrasi, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya, yakni merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari kemiskinan.

"Saya mengistilahkan kehadiran partai politik di tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan napas kesejahteraan," urainya.

Gus AMI mengatakan peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan. "Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini tidak ada negara miskin kecuali yang tidak terkelola dengan baik," ujarnya.

Menurut mantan menakertrans ini, partai politik bisa menjadi *leader* andal dalam mengkreasi upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

"Karena itu, tak ada kata lain, visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan partai politik," katanya.

Tidak bisa parsial

Menurut Gus AMI, pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

Karena itu, PKB melalui kader-kadernya di pemerintahan dan parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan parsial dan tambal sulam.

"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," urainya.

Di masa pandemi, ada tiga hal yang jadi titik tekan perjuangan politik, yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan. Pertama, pendidikan untuk semua (*education for all*).

Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren ialah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisasi risiko buruk akibat covid-19, yakni terjadinya *lost generation*.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian.

Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No 6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (*rural economy*) secara masif dengan menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.

Terakhir, ekonomi kerakyatan. Akibat pandemi, sektor ini yang paling terkena dampak. Sektor ekonomi kerakyatan yang bagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai penyangga masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123,46 triun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," turnya. (RO/S3-25)